Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak
Volume. 3, Nomor. 2 Juni 2026
E-ISSN .: 3046-942; P-ISSN .: 3046-8752, Hal. 73-84
DOI: https://doi.org/10.61132/jieap.v3i2.2287
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP

Analisis Pencatatan Keuangan Desa Wisata sebagai Entitas Pelaporan Akuntansi pada Desa Wisata Karangrejo Borobudur

Tesa Br Simbolon[1*], Putri Nur Setyowati[2], Desta Amanda Desfillia Azzahra[3], Suci Nasehati Sunaningsih, SE, M.Acc.[4]
[1-4] Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Tidar Magelang, Indonesia

**Penulis Korespondensi: tesasimbolon3@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the financial recording system, tourism revenue management, and the feasibility of Karangrejo Tourism Village as a public sector accounting reporting entity. The research employed a descriptive qualitative approach with field study methods. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that Karangrejo Village has implemented a systematic financial recording process through the Siskeudes application since 2012. Tourism revenue generated from Punthuk Setumbu, Balkondes, and Village-Owned Enterprises (BUMDes) contributes significantly to Village Original Income (PADesa) and supports local development programs. Financial recording is conducted independently by each tourism management unit, followed by monthly and annual reporting mechanisms. The reporting process is carried out transparently and accountably to both the local government and the community without significant obstacles. Furthermore, effective coordination among stakeholders strengthens financial governance and oversight. The study concludes that Karangrejo Tourism Village is feasible as an accounting reporting entity because it possesses clear income sources, manages economic resources independently, conducts financial recording systematically, and prepares accountability reports in accordance with public sector governance principles.*

Keywords: *Karangrejo; Reporting Entity; Siskeudes; Tourism Village; Village Financial Recording.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pencatatan keuangan, pengelolaan pendapatan pariwisata, serta kelayakan Desa Wisata Karangrejo sebagai entitas pelaporan akuntansi sektor publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Karangrejo telah menerapkan proses pencatatan keuangan secara sistematis melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sejak tahun 2012. Pendapatan pariwisata yang berasal dari Punthuk Setumbu, Balkondes, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa) serta mendukung berbagai program pembangunan desa. Pencatatan keuangan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unit pengelola wisata dan diikuti dengan mekanisme pelaporan bulanan serta tahunan. Proses pelaporan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel kepada pemerintah daerah maupun masyarakat tanpa mengalami kendala yang berarti. Selain itu, koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan turut memperkuat tata kelola dan pengawasan keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Desa Wisata Karangrejo layak menjadi entitas pelaporan akuntansi karena memiliki sumber pendapatan yang jelas, mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri, melaksanakan pencatatan keuangan secara sistematis, serta menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola sektor publik.

Kata kunci: Desa Wisata; Entitas Pelaporan; Karangrejo; Pencatatan Keuangan Desa; Siskeudes.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan desa wisata berbasis masyarakat di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat dan menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta kesejahteraan masyarakat desa. Desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai destinasi pariwisata, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi

Naskah Masuk: 08 Februari 2026; Revisi: 09 Maret 2026; Diterima: 10 Mei 2026; Tersedia: 17 Juni 2026

alam, budaya, dan usaha lokal (Suprobowati et al., 2022). Salah satu desa wisata yang berkembang adalah Desa Wisata Karangrejo yang terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sejak sekitar tahun 2012, Desa Karangrejo mulai mengoptimalkan potensi alam dan budaya yang dimiliki, seperti objek wisata Punthuk Setumbu, Balkondes, *homestay*, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Perkembangan desa wisata menyebabkan pengelolaan keuangan desa menjadi semakin penting. Pendapatan desa tidak hanya berasal dari transfer pemerintah berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD), tetapi juga berasal dari pendapatan asli desa melalui sektor pariwisata. Pendapatan dari sektor wisata memberikan kontribusi terhadap pembiayaan desa dan kegiatan masyarakat, meskipun belum sepenuhnya mampu menutupi seluruh kebutuhan anggaran desa. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas pengelolaan keuangan desa menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai sumber pendapatan dan pengeluaran.

Kompleksitas pengelolaan pendapatan dan belanja desa menuntut adanya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Republik Indonesia, 2010). Oleh karena itu, desa yang mengelola dana publik dan memiliki aktivitas ekonomi dapat dikategorikan sebagai entitas pelaporan akuntansi (Nugroho, 2018)**.**

Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik merupakan alat pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan dana publik secara transparan dan akuntabel. Dalam praktiknya, Desa Karangrejo telah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara rutin, terbuka kepada masyarakat, serta dilaporkan kepada pemerintah daerah. Selain itu, penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) turut mendukung proses pengelolaan keuangan desa sehingga pencatatan keuangan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan sistematis. (Setiowati & Isna Fitria Agustina, 2024) menjelaskan bahwa Siskeudes digunakan untuk mendukung proses pelaporan keuangan desa agar lebih tertib dan terarah.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, Balkondes Karangrejo telah memiliki laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, serta grafik perkembangan omset tahunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Desa Wisata Karangrejo telah menerapkan praktik pencatatan dan pelaporan keuangan dalam pengelolaan sektor wisata desa. Namun, peningkatan kualitas pelaporan keuangan tetap diperlukan agar desa dapat lebih optimal dalam memenuhi kriteria sebagai entitas pelaporan akuntansi sektor publik.

Desa Wisata Karangrejo dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki perkembangan wisata yang cukup pesat, keragaman sumber pendapatan, praktik pencatatan keuangan yang transparan, serta dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat desa. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan dana pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat dari sektor wisata. Pencatatan keuangan diperlukan untuk menunjukkan alur penerimaan dan penggunaan dana secara terstruktur sehingga dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pencatatan keuangan pada Desa Wisata Karangrejo Borobudur, mengetahui pengelolaan dana desa dan pendapatan sektor wisata, serta menganalisis kelayakan Desa Wisata Karangrejo sebagai entitas pelaporan akuntansi berdasarkan sistem pelaporan keuangan yang dimiliki. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik desa serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa wisata.

2. KAJIAN TEORITIS

Pencatatan Keuangan Desa

Pencatatan keuangan desa merupakan proses pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam pengelolaan keuangan desa. Proses tersebut menjadi bagian dari penatausahaan keuangan desa karena digunakan sebagai dasar penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Republik Indonesia, 2018a).

Setiap transaksi keuangan desa perlu ditata agar sumber penerimaan dan penggunaan dana dapat ditelusuri. Pada pengelolaan keuangan desa, transaksi keuangan desa mencakup penerimaan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yang disusun dalam APBDes. Pencatatan yang tertib diperlukan agar pemerintah desa dapat menyajikan informasi keuangan sesuai kebutuhan laporan.

Setiowati & Isna Fitria Agustina (2024) menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes digunakan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa, termasuk proses penatausahaan dan pelaporan keuangan. Penggunaan sistem tersebut membantu pemerintah desa menyusun laporan keuangan sesuai tahapan pengelolaan keuangan desa.

Entitas Pelaporan Akuntansi

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang dilakukan. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Republik Indonesia, 2010).

(Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik merupakan alat pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan dana publik secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap organisasi sektor publik yang mengelola dana masyarakat wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Suatu organisasi dapat dikatakan sebagai entitas pelaporan apabila memiliki beberapa ciri, seperti memiliki sumber pendapatan, melakukan pengelolaan keuangan, mengelola aset atau sumber daya ekonomi, serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam sektor pemerintahan desa, laporan keuangan diperlukan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa kepada pemerintah maupun masyarakat.

Desa dapat dikategorikan sebagai entitas pelaporan karena desa memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan desa yang berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, maupun pendapatan asli desa. Pada desa wisata, aktivitas pengelolaan keuangan menjadi lebih kompleks karena selain mengelola dana pemerintah, desa juga memperoleh pendapatan dari sektor wisata, seperti pengelolaan Balkondes, *homestay*, dan usaha wisata lainnya.

Pencatatan Keuangan Desa

Pencatatan keuangan desa merupakan proses sistematis dalam mengelola, mencatat, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Republik Indonesia, 2014, 2018b).

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Struktur APBDes terdiri atas pendapatan desa (PADesa, transfer, dan pendapatan lain-lain), belanja desa (pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat), serta pembiayaan desa.

b. Dana Desa

Dana Desa adalah dana dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa digunakan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa (Republik Indonesia, 2014). Pencatatan Dana Desa harus dilakukan secara rinci karena menjadi sumber utama pembiayaan desa.

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD adalah dana yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD. ADD bertujuan mendukung operasional pemerintahan desa, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan memperkuat kelembagaan desa. ADD termasuk dalam kelompok transfer kepada desa yang harus dicatat secara transparan.

d. Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan keuangan selama satu periode anggaran, meliputi Laporan Realisasi APBDes, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Laporan Program Pemerintah yang Masuk ke Desa. Dalam praktiknya, pencatatan dan pelaporan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes yang dikembangkan oleh BPKP untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan desa.

Desa Wisata

a. Pengertian Desa Wisata

Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang memiliki potensi wisata berbasis kearifan lokal, baik berupa potensi alam, budaya, maupun hasil kreativitas masyarakat. Desa wisata merupakan bentuk pengembangan pariwisata bebasis komunitas yang memanfaatkan potensi desa sebagai daya tarik wisata. Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai bagian penting pengelolaan dan pengembangan kegiatan wisata desa (Lasally et al., 2021). Berdasarkan Pedoman Desa Wisata dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (2021), kriteria desa wisata meliputi: memiliki potensi daya tarik wisata, komunitas masyarakat, sumber daya manusia lokal, kelembagaan pengelola, sarana prasarana pendukung, serta potensi pasar wisatawan. Dengan demikian, desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang dikelola secara terpadu oleh masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya dan kearifan lokal.

b. Pengelolaan Ekonomi Desa Wisata

Pengelolaan ekonomi desa wisata bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan *community-based tourism* (CBT), yaitu model pariwisata yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan wisata.

Masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti *homestay*, pemandu wisata, kuliner lokal, dan kerajinan tangan. Pengelolaan juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi lokal untuk mengelola potensi pariwisata. Prinsip keberlanjutan harus diperhatikan dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan ekonomi desa wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, serta keberlanjutan pembangunan desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *study field* (studi lapangan). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami praktik pencatatan keuangan Desa Wisata Karangrejo Borobudur sebagai entitas pelaporan keuangan. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan sistem pencatatan keuangan, pengelolaan keuangan dana desa, pendapatan wisata, serta penyajian informasi keuangan pada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penelitian dilakukan di Desa Wisata Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa ini dipilih karena merupakan salah satu desa wisata yang berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dari sektor pariwisata, seperti pengelolaan Balkondes, *homestay*, dan objek wisata Punthuk Setumbu. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Wisata Karangrejo, observasi langsung, dan dokumentasi lapangan. Observasi dilakukan terhadap informasi yang tersedia di lokasi penelitian, seperti banner, papan informasi, laporan *sharing profit* Balkondes, dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa wisata. Data sekunder diperoleh dari *website* resmi Desa Karangrejo dan artikel ilmiah terdahulu yang meneliti Desa Karangrejo Borobudur.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan untuk menilai pencatatan keuangan Desa Wisata Karangrejo sebagai entitas pelaporan akuntansi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Wisata Karangrejo

Desa Karangrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa ini berada di sebelah barat Candi Borobudur dengan jarak sekitar 3 km. Letak tersebut mendukung perkembangan Desa Karangrejo sebagai salah satu desa wisata di Borobudur. Selain itu, Desa Karangrejo juga dikenal sebagai desa penyangga wisata Candi Borobudur yang memiliki potensi alam, kebudayaan, kerajinan, dan kuliner lokal (Desa Karangrejo, 2023).

Desa Wisata Karangrejo memiliki beberapa daya tarik wisata, seperti Punthuk Setumbu, Bukit Rhema, Bukit Barade, Balkondes Karangrejo, dan aktivitas wisata berbasis masyarakat. Desa Karangrejo tercatat masuk dalam 10 besar Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2019 dan mewakili Kabupaten Magelang dalam Gelar Desa Wisata Jawa Tengah tahun 2022. Pengembangan wisata di Desa Karangrejo didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan wisata, seperti paket wisata, *homestay*, atraksi budaya, dan pelayanan berbasis (Desa Karangrejo, 2022).

Pengembangan Desa Wisata Karangrejo juga didukung oleh penelitian terdahulu. Penelitian oleh Oktafiarni & Hariyanti (2022) menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Karangrejo melibatkan pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja dari warga setempat. Penelitian oleh Satriya et al. (2023) menjelaskan bahwa atraksi dan aktivitas wisata di Desa Karangrejo berkembang melalui inovasi masyarakat, salah satunya kawasan Punthuk Setumbu. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas wisata di Desa Karangrejo tidak hanya berkaitan dengan daya tarik destinasi, tetapi juga kegiatan ekonomi masyarakat.

Sistem Pencatatan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, sistem pencatatan keuangan di Desa Wisata Karangrejo telah menggunakan aplikasi Siskeudes. Penggunaan aplikasi tersebut membantu proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran desa secara lebih terstruktur.

Pengelolaan keuangan dilakukan terhadap Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta pendapatan dari sektor wisata. pencatatan dilakukan oleh masing-masing pengelola unit wisata dan BUMDes, kemudian dilaporkan secara berkala dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa Balkondes Karangrejo telah memiliki laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, serta grafik perkembangan omzet tahunan. Berdasarkan dokumentasi tahun 2025, laporan keuangan telah memuat pencatatan aset, kas, modal, dan perkembangan omzet wisata desa. Selain itu, laporan keuangan desa juga dipublikasikan

melalui papan informasi desa dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa sistem pencatatan keuangan yang baik diperlukan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, sistem pencatatan keuangan pada Desa Wisata Karangrejo menunjukkan adanya upaya pengelolaan keuangan desa yang lebih profesional dan akuntabel.

Pengelolaan Pendapatan Wisata

Tabel 1. Pengelolaan pendapatan wisata desa Karangrejo

Aspek	Keterangan
Sumber Pendapatan Utama	Objek wisata Punthuk Setumbu, unit usaha BUMDes, aktivitas ekonomi masyarakat
Kontribusi terhadap PADesa	Dominan dibandingkan transfer pemerintah
Tahun Mulai Pencatatan	Sekitar tahun 2012
Sistem Pencatatan	Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
Pelaksana Pencatatan	Setiap destinasi wisata dan BUMDes secara mandiri
Periode Pelaporan	Bulanan dan tahunan
Transparansi Laporan	Papan informasi desa dan sosialisasi melalui RT/RW
Pertanggungjawaban	Dilaporkan kepada pemerintah daerah
Kendala Pencatatan	Tidak ditemukan kendala signifikan
Integrasi Keuangan	Laporan BUMDes terintegrasi ke dalam APBDes

Prinsip Pengelolaan	*Good governance* (transparan dan akuntabel)

Pengelolaan pendapatan wisata di Desa Wisata Karangrejo Borobudur telah berjalan dengan baik, sistematis, dan transparan. Namun, peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan tetap diperlukan untuk mengoptimalkan peran desa sebagai entitas pelaporan akuntansi sektor publik.

Analisis Desa sebagai Entitas Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian, Desa Wisata Karangrejo dapat dikatakan layak sebagai entitas pelaporan akuntansi. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengelolaan sumber daya ekonomi, pencatatan keuangan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Desa Karangrejo tidak hanya menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, tetapi juga memperoleh pendapatan dari sektor wisata yang dikelola melalui Balkondes dan unit usaha masyarakat. Seluruh aktivitas keuangan tersebut dicatat dan dilaporkan secara berkala menggunakan aplikasi Siskeudes.

Menurut KSAP dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Desa Wisata Karangrejo telah memenuhi unsur sebagai entitas pelaporan karena memiliki sumber pendapatan, melakukan pengelolaan keuangan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah serta masyarakat (Republik Indonesia, 2010).

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa Balkondes Karangrejo telah memiliki laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, grafik perkembangan omset, serta pencatatan pendapatan wisata secara berkala. Selain itu, pengelolaan keuangan desa telah menggunakan aplikasi Siskeudes sehingga proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan sistematis.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan dana publik secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut terlihat pada Desa Wisata Karangrejo melalui adanya papan informasi desa, laporan keuangan, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, Desa Wisata Karangrejo telah menunjukkan karakteristik sebagai entitas pelaporan akuntansi karena memiliki pengelolaan sumber daya ekonomi, sistem pencatatan keuangan, serta pertanggungjawaban publik yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pencatatan keuangan di Desa Wisata Karangrejo Borobudur telah dilakukan secara rutin dan terstruktur. Pencatatan keuangan desa didukung oleh penggunaan aplikasi Siskeudes, sehingga penerimaan dan pengeluaran desa dapat dicatat dan dilaporkan dengan lebih sistematis. Selain itu, unit pengelolaan wisata seperti destinasi wisata, Balkondes, dan BUMDes juga memiliki pencatatan atau pelaporan keuangan masing-masing sesuai dengan kegiatan yang dikelola.

Pengelolaan pendapatan Desa Wisata Karangrejo berasal dari dana pemerintah, PADes, dan sektor wisata. Pendapatan sektor wisata diperoleh melalui objek wisata, Balkondes, BUMDes, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pendapatan tersebut berperan dalam membantu keuangan desa, meskipun belum sepenuhnya menutup seluruh kebutuhan operasional. Transparansi pengelolaan keuangan dilakukan melalui papan informasi desa, penyampaian kepada masyarakat melalui RT/RW, serta pelaporan kepada pemerintah daerah.

Desa Wisata Karangrejo dapat dianggap layak sebagai entitas pelaporan akuntansi karena memiliki sumber pendapatan, mengelola sumber daya ekonomi, melakukan pencatatan keuangan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Aktivitas wisata yang berkembang di Desa Karangrejo menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi unsur penting dalam pengelolaan desa wisata. Oleh karena itu, kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan perlu terus ditingkatkan agar informasi keuangan yang dihasilkan lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mendukung pertanggungjawaban keuangan desa secara berkelanjutan.

Saran

a. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Karangrejo disarankan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan menyusun laporan yang lebih lengkap sesuai standar akuntansi pemerintahan, memperkuat integrasi pencatatan antara BUMDes dan Siskeudes, mengadakan pelatihan rutin bagi perangkat desa, serta mempublikasikan laporan keuangan secara digital melalui website atau media sosial untuk meningkatkan transparansi.

b. Bagi Pengelola Wisata

Pengelola wisata (BUMDes, Balkondes, dan destinasi wisata) disarankan untuk menyamakan periode pelaporan keuangan antar unit, memisahkan catatan pendapatan berdasarkan sumber (tiket, parkir, homestay, kuliner), membuat arsip digital seluruh

dokumen keuangan, serta melakukan evaluasi keuangan secara berkala guna mengidentifikasi potensi peningkatan pendapatan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi kuantitatif mengenai efektivitas Siskeudes, penelitian komparatif antar desa wisata di kawasan Borobudur, serta kajian tentang dampak pencatatan keuangan terhadap keberlanjutan pengelolaan keuangan desa wisata.

DAFTAR REFERENSI

Desa Karangrejo. (2022). *Karangrejo wakili Magelang dalam Gelar Desa Wisata Jateng 2022*.

Desa Karangrejo. (2023). *Menilik Desa Wisata Karangrejo, keindahan alam, kebudayaan, kerajinan, dan ragam kuliner lebur menjadi satu*.

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2021). *Pedoman desa wisata*. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Lasally, A., Khairunnisa, H., Akbar, D., & Mahfudz, A. (2021). Pengembangan desa wisata berbasis komunitas di Yogyakarta (studi kasus: Desa Wisata Sambi). *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, 6*(1). https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8021

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi.

Oktafiarni, Z. N., & Hariyanti, P. (2022). Komunikasi pemberdayaan pemerintah Desa Wisata Karangrejo Borobudur Magelang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* (hlm. 96–102).

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Putra, I. G. A., & Sujana, E. (2020). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan objek wisata Aling-Aling Waterfall sebagai pendapatan tambahan Desa Sambangan. *Jurnal Akuntansi Profesi*.

Satriya, C. Y., Indrayani, H., & Pamungkas, H. (2023). Implementasi komunikasi partisipatif untuk mengembangkan model CBT di Desa Wisata Karangrejo Magelang. *Jurnal Audiens, 6*(3). https://doi.org/10.62411/ja.v6i3.1314

Setiowati, M., & Agustina, I. F. (2024). Efektivitas penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pelaporan keuangan di Desa Permisan Kecamatan Jabon. *Journal Publicuho, 7*(3), 1663–1676. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.527

Siregar, D., & Harahap, R. (2019). Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Administrasi Publik*.

Suprobowati, D., Sugiharto, M., & Miskan. (2022). Strategi pengembangan desa wisata berbasis masyarakat kearifan lokal Hendrosari Gresik. *Jurnal Manajemen Negara*, *6*(1). https://doi.org/10.25139/jmnegara.v6i1.4551

Nugroho, I. (2018). *Perencanaan pembangunan desa wisata: Konsep dan implementasi*. PT Gramedia Pustaka Utama.